

## PROBLEM KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT BAGI SILA KELIMA PANCASILA

Annebelle Aaqilah Rahmadani<sup>1</sup>, Azizah Salsabila<sup>2</sup>, Faria Bora<sup>3</sup>, Ghiffari Zakka Maulana<sup>4</sup>, Nor Azizah<sup>5</sup>

[ghiffari.zakka.2404216@students.um.ac.id](mailto:ghiffari.zakka.2404216@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

Social inequality covers various aspects of life, such as inequality in education when access to quality education is unequal, especially for poor families or those living in remote areas. Barriers such as high costs and lack of educational facilities prevent children from disadvantaged families from getting an adequate education, which impacts their chances of obtaining decent work in the future. Social inequality is exacerbated by other factors, such as unequal distribution of wealth and resources. Disadvantaged communities often lack equal access to basic services, such as education and health, further exacerbating inequalities. In addition, inequality between individuals, society and the state also exacerbates this condition, where unfair or uneven policies can widen existing gaps. Research on social inequality shows that economic equality policies can be a solution to reduce this inequality. Economic equality focuses on fair distribution of income, equal access to education and health, and the creation of economic opportunities for the entire community. The results of the analysis show that this policy can improve the quality of life, reduce poverty and reduce the income gap between social groups. To effectively address social inequality, inclusive and fair policies are needed, which ensure equal distribution of opportunities and resources for all levels of society. Efforts to reduce inequality must involve improvements in the education system, increasing its quality and accessibility, providing equitable health services, and economic empowerment for vulnerable groups. With the right approach, social inequality can be minimized, and a more just and prosperous society can be realized.

**Keywords:** Social inequality, Inequality, Economic equality, Quality of life, Poverty

### Abstrak

Ketimpangan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti Ketimpangan terhadap pendidikan ketika akses terhadap pendidikan yang berkualitas tidak merata, terutama bagi keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil. Hambatan seperti biaya tinggi dan kurangnya sarana pendidikan menghalangi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, yang berdampak pada peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Ketimpangan sosial diperburuk oleh faktor-faktor lain, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan sumber daya. Masyarakat yang kurang beruntung sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan. Selain itu, ketimpangan antara individu, masyarakat, dan negara juga memperburuk kondisi ini, di mana kebijakan yang tidak adil atau tidak merata dapat memperlebar kesenjangan yang ada. Penelitian mengenai ketimpangan sosial menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pemerataan ekonomi berfokus pada distribusi pendapatan yang adil, akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial. Untuk mengatasi ketimpangan sosial secara efektif, diperlukan kebijakan yang inklusif dan adil, yang memastikan pemerataan kesempatan dan sumber daya bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya pengurangan ketimpangan ini harus melibatkan perbaikan dalam sistem pendidikan, peningkatan kualitas dan aksesibilitasnya,

penyediaan layanan kesehatan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok rentan. Dengan pendekatan yang tepat, ketimpangan sosial dapat diminimalisir, dan masyarakat yang lebih adil serta sejahtera dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Ketimpangan sosial, Kesenjangan, Pemerataan ekonomi, Kualitas hidup, Kemiskinan

## **PENDAHULUAN**

Ketimpangan sosial merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat (Irawan & Sulisty, 2022), di mana kesenjangan ini sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat realistis serta merujuk pada kesenjangan yang muncul antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tidak meratanya pembangunan, ataupun masalah distribusi pendapatan. Menurut Max Weber (1978) dalam teori Stratifikasi Tiga Komponen, ketimpangan sosial bergantung pada usaha individu untuk mencapai kekayaan (dimensi kelas), berkaitan dengan individu atau kelompok dalam berhubungan dengan satu sama lain (dimensi status), ketika yang berkuasa cenderung lebih mendominasi (dimensi kekuasaan). Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023, indeks ketimpangan gini (gender) di Indonesia tercatat sebesar 0,38, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,37 yang menunjukkan adanya penurunan dan perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Selain itu, menurut World Bank (2023), Indeks Gini nasional Indonesia mencapai 38,8 pada bulan Maret, naik 0,4 poin dari tahun sebelumnya dan mencapai level tertinggi sejak 2018. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terhambatnya mobilitas sosial dan kesulitan akses bagi kelompok tertentu dalam meraih peluang yang sama.

Terkait masalah ketimpangan sosial ini mengarah pada perlunya intervensi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kebijakan inklusif, dimana pemecahan masalah dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis ekonomi mikro yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat miskin, serta pengembangan program-program yang mendukung peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan, seperti program bantuan sosial dan subsidi pendidikan, harus diimbangi dengan pemberdayaan sektor ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno dalam Bantika, Benu, & Kapantow, 2015).

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis akar penyebab ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kebijakan yang relevan serta pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk mempercepat tercapainya pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan jenis pengambilan data yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan, yaitu mencari referensi yang relevan dengan studi kasus ketimpangan sosial dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021) . Penelitian deskriptif bertujuan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan suatu situasi kondisi yang berhubungan maupun akibat dan efek yang timbul.

Studi literatur adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa metode pengumpulan data dari referensi terdahulu hingga mendapatkan hasil penelitian. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis dalam Nurlita, 2016).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menyusun fakta-fakta untuk kemudian dianalisis hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan dilakukan pemilahan, perbandingan, penggabungan hingga ditemukan data yang relevan.

Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini (Putri, Bramasta, & Hawanti, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sila Kelima Pancasila menekankan pentingnya pemerataan, distribusi kekayaan, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Dalam konteks kebijakan sosial, Sila Kelima mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menciptakan keadilan sosial, seperti program kesejahteraan, subsidi pendidikan, dan akses kesehatan yang merata. Maka akan terbentuknya sikap solidaritas antar masyarakat (Yasila & Najicha, 2022). Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana realisasi Sila Kelima Pancasila dalam kebijakan sosial telah memberikan kontribusi positif dalam mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Pengawasan dan pemeriksaan ini harus dilakukan di berbagai jalur, yakni jalur udara melalui bandara, jalur laut melalui Pelabuhan, jalur laut melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta tempat lain yang telah ditunjuk oleh otoritas yang berwenang (Arifin, 2018).

Melalui analisis mendalam terhadap berbagai program dan kebijakan sosial yang telah diterapkan, paper ini akan mencoba menentukan sejauh mana Sila Kelima telah menjadi landasan yang kuat dalam upaya mengatasi masalah sosial di Indonesia dan mengevaluasi sejauh mana perlu langkah-langkah perbaikan lebih lanjut. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas yang merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa (Septiano & Najicha, 2022). Aktualisasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua pendekatan secara objektif dan secara subjektif. Aktualisasi pancasila secara obyektif, menjadikan pancasila sebagai landasan idiil dan materil dalam setiap aspek penyelenggaraan negara yang berarti setiap perbuatan dan/atau tindakan pemerintah dan rakyat dalam konsepsi negara hukum harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai tersebut. Sedangkan aktualisasi pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila. Sikap dan tingkah laku seseorang sangat menentukan terlaksananya nilai-nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan (Afgrinadika Wibowo & Ulfatun Najicha, 2022).

Bela negara sendiri diartikan sebagai sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap bela negara ini dapat dilihat berdasarkan UUD Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara", dalam hal ini masing-masing warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara baik fisik maupun non dan etika fisik (Saputro and Ulfatun Najicha 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sila Kelima Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan sosial di Indonesia. Selain itu, datangnya warga negara asing ini akan menimbulkan keresahan di bidang budaya, dimana mereka dapat membawa banyak kebudayaan asing pada masyarakat kita, yang

dapat membuat masyarakat kita terfokus pada adanya kebudayaan asing dibandingkan dengan kebudayaan negara sendiri. Sikap inilah yang akan menyebabkan jati diri bangsa Indonesia luntur dimakan zaman (Akbar and Najicha 2022). Prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" telah menjadi dasar filosofis bagi sejumlah kebijakan yang bertujuan mengatasi kesenjangan sosial. Padahal, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan baik dari pemerintah (Sari & Ulfatun Najicha, 2022). Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif ditujukan untuk pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketidakesetaraan ekonomi.

Pancasila juga merupakan pedoman hidup dalam kegiatan bermasyarakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat memengaruhi tingkah laku masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar tepat dengan norma yang berlaku (Amalia & Ulfatun Najicha, 2023). Sila Kelima Pancasila, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan landasan prinsipal dalam mencapai tujuan negara yang adil dan merata. Karena keluarga bisa dinilai menjadi faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa nasionalisme. (Abdul Azis Saputra & Ulfatun Najicha, 2021) Namun, dalam praktiknya, implementasi Sila Kelima ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang terus berlanjut di negara ini. Dimana tenaga kerja asing ini bekerja di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, konstruksi, manager, bahkan buruh sehingga hal ini sangat menyingkirkan tenaga kerja lokal dan melonjaknya angka pengangguran akibat tenaga kerja lokal kalah saing dengan tenaga kerja asing (Abduh, 2020). Meskipun prinsip keadilan sosial menjadi komitmen pemerintah, ketidakesetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses ke layanan dasar masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga menjadi kendala dalam mewujudkan Sila Kelima.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan sosial perlu terus ditingkatkan, baik melalui perbaikan regulasi, tindakan pencegahan korupsi, maupun upaya nyata untuk memberikan akses yang setara kepada seluruh warga negara terhadap sumber daya dan layanan penting. Tidak memiliki sifat egois hingga menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. (Sahadewa & Najicha, 2022) Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat lebih efektif mewujudkan Sila Kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi ketidakesetaraan yang ada. Dengan begitu salah satu kompetensi yang dapat dioptimalkan melalui adanya kemajuan teknologi adalah kompetensi civic knowledge. (Kirani & Najicha, 2022) Meskipun ada upaya yang signifikan, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi Sila Kelima Pancasila. Terdapat kendala dalam pengawasan, alokasi sumber daya, dan kebijakan yang belum selalu konsisten dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, masih ada aspek-aspek tertentu, seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang perlu mendapatkan perhatian lebih intensif.

Masyarakat sipil, sering juga disebut sebagai civil society, merujuk pada kelompok-kelompok, organisasi, dan individu di luar pemerintah dan sektor bisnis yang terlibat dalam urusan publik. Masyarakat sipil terdiri dari organisasi nirlaba, LSM, aktivis, akademisi, dan individu yang memiliki kepentingan dalam mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan partisipasi publik. Penelitian ini menemukan bahwa peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan organisasi organisasi non-pemerintah, kontribusi yang signifikan memiliki dalam mendorong implementasi Sila Kelima Pancasila. Hilangnya kebudayaan ini akan mengancam keadaan dan ketahanan nasionalisme Indonesia (Nisrina & Najicha, 2022). Mereka sering kali berperan sebagai pengawas, advokat, dan pelaksana program-program sosial yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial. Masyarakat sipil memiliki kontribusi yang signifikan dalam memastikan

bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial yang tertanam dalam Pancasila dijalankan secara efektif oleh pemerintah dan lembaga lembaga terkait.

Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas, penggerak, dan penegak kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan kesetaraan. Dalam konteks ini, paper mengeksplorasi bagaimana masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan masukan, melakukan advokasi, dan memantau implementasi kebijakan yang mendukung terciptanya keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, paper juga mengkaji sejauh mana realisasi Sila Kelima Pancasila telah tercapai dalam mengatasi kesenjangan sosial, serta upaya apa yang diperlukan untuk pencapaian keadilan meningkatkan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat sipil dapat berperan dalam mempromosikan dan menjaga keadilan sosial di Indonesia. Membangun Kesadaran Publik : Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu keadilan sosial. Mereka dapat menggunakan media, kampanye, dan menyoroti pendidikan ketidaksetaraan untuk sosial, kemiskinan, dan isu-isu serupa. Maka dari itu, dampak dari globalisasi ini sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia di belahan bumi manapun (Afgrinadika Wibowo et al., n.d.). Advokasi Kebijakan : Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas pemerintah dan lembaga-lembaga publik.

Mereka dapat mengawasi pelaksanaan program-program keadilan sosial, memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mendukung keadilan sosial diimplementasikan dengan baik. Membantu Kelompok Rentan : Organisasi masyarakat sipil sering fokus pada mendukung kelompok-kelompok rentan seperti kaum miskin, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Mereka menyediakan layanan dan dukungan bagi kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengedukasi dan Melibatkan Masyarakat : Masyarakat sipil dapat memberdayakan masyarakat memberikan pengetahuan dengan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial. Mereka juga dapat mengorganisir kampanye kampanye yang melibatkan masyarakat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

Hasil penelitian juga mencakup evaluasi terhadap sejumlah program sosial yang telah diimplementasikan. Program program ini termasuk bantuan sosial, program pendidikan, dan layanan kesehatan. Evaluasi ini mencakup sejauh mana program-program tersebut berhasil dalam mencapai tujuan mengurangi kesenjangan sosial, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Didalam banyak hal memang hal ini menimbulkan banyak kontra terutama konflik sosial, namun dengan menghargai perbedaan dan menerima keberagaman yang ada, serta mengimplementasikan konsep Wawasan Nusantara maka rasa nasionalisme ini akan lebih mencuat (Binawan & Najicha, 2023).

Evaluasi terhadap keberhasilan program-program sosial adalah langkah penting dalam menilai sejauh mana negara telah mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya Sila Kelima yang menekankan keadilan sosial. Dalam paper ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana program-program sosial telah membantu mengatasi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, apakah program tersebut telah mencapai tujuannya, dan sejauh mana keadilan sosial telah direalisasikan dalam proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam pembahasan, peneliti dapat menganalisis berbagai indikator keberhasilan program sosial, seperti tingkat partisipasi masyarakat, dampak positif yang dihasilkan, serta tingkat keterlibatan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Lingkungan salah satu faktor pembentuk suatu individu (Nugroho & Najicha, 2023).

Selain itu, peneliti juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin menghambat program sosial, keberhasilan seperti kendala administratif, kebijakan yang kurang efektif, atau kurangnya alokasi sumber daya yang memadai. Akibat banyaknya warga negara asing yang datang ke Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian, karena tiap individu

dimudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan di Indonesia seperti melakukan kegiatan ekspedisi dari suatu negara ke negara yang lain (Niazela and Herlina 2020). Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap keberhasilan program program sosial dalam konteks Sila Kelima Pancasila, paper ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang sejauh mana keadilan sosial telah terealisasi dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia.

Menjaga keutuhan Indonesia Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masalah akan muncul dari segala penjuru jika bangsa Indonesia tidak menanamkan dan mengamalkan cita-cita tersebut. Padahal, pemerintah telah memberikan fasilitas yang layak untuk digunakan bersama sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab dan amanah dalam menjaga fasilitas tersebut (Fadilla & Najicha, 2022). Untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat, bangsa, dan melestarikan negara, kita harus nilai-nilai Pancasila (Sariputta & Ulfatun Najicha, 2023).

Dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Pertama, diperlukan peningkatan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi dan peluang pendidikan yang lebih merata di seluruh negeri. Keadilan sosial harus menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi dan pendidikan, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan. Kedua, perlu adanya reformasi hukum dan sistem peradilan yang lebih efisien dan adil untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat Indonesia dilindungi dengan baik, terutama hak-hak yang terkait dengan keadilan sosial. Ketiga, pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan politik, serta memastikan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai membudayakan sikap toleransi, hakekat toleransi yaitu hidup berdampingan dan menghargai secara damai di antara banyaknya perbedaan (Bangun Prakoso & Ulfatun Najicha, 2022).

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat realisasi Sila Kelima Pancasila demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan merata. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan realisasi Sila Kelima Pancasila dalam mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup perluasan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi kebijakan sosial yang lebih adil. Dalam keseluruhan, hasil dan pembahasan ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran Sila Kelima Pancasila dalam mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia, serta tantangan dan potensi solusi untuk meningkatkan implementasinya.

Pelanggaran dan penyalahgunaan visa ini misalnya jika seorang warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia mengurus visa turis yang masa berlakunya hanya untuk 60 hari tinggal, namun warga negara asing ini malah menyalahgunakannya seperti tinggal lebih lama bahkan melakukan kegiatan ilegal yang seharusnya tidak dapat dilakukan dengan visa turis ini misalnya untuk bekerja di negara Indonesia (Hamdi, 2019). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Sehingga, pengimplementasian pancasila yang sudah dipahami dapat diterapkan dengan baik (Rizqullah & Najicha, 2022). Jika nilai Wawasan Nusantara sudah tertanam pada generasi muda, maka rasa nasionalisme akan muncul dengan sendirinya (Saputri & Najicha, 2023). Seperti memberikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk nyata dalam upaya membentuk warga negara Indonesia, khususnya generasi 2 muda agar paham dan memiliki nilai-nilai dasar Pancasila (Rizky Amalia et al., 2022).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sila Kelima Pancasila, yang menekankan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki peran yang sangat

penting dalam membentuk kebijakan sosial di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai inisiatif pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial, tantangan dalam implementasinya masih signifikan, termasuk masalah distribusi sumber daya yang tidak merata, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terbatas, serta korupsi dan birokrasi yang lambat. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila melalui advokasi dan pengawasan kebijakan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik, diperlukan reformasi dalam sistem hukum, peningkatan transparansi penggunaan dana publik, serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Sila Kelima Pancasila dapat diaktualisasikan secara lebih efektif, sehingga ketimpangan sosial di Indonesia dapat diminimalkan dan tercipta masyarakat yang lebih adil dan merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Azis Saputra, I., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Jiwa Nasionalisme. In *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* (Vol. 2, Issue 1). <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/>

Indonesia, B. P. S. (2024). Gini Ratio Maret 2024 TERCATAT Sebesar 0,379. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html>

Irawan, A., & Sulisty, A. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. doi:10.37640/jcv.v2i1.1184 WorldBank. (n.d.). Gini Index (World Bank estimate). <https://genderdata.worldbank.org/en/indicator/si-pov-gini>

Nurlita, A. A. (n.d.). Studi Literatur Pengaruh hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Dan Hasil belajar Kewirausahaan terhadap Keputusan Rencana karier Peserta. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/uvd/article/view/7196>

Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi Literatur Tentang peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam pembelajaran Menggunakan model Pembelajaran the power of two DI SD. Retrieved from <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/561>

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. doi:10.55623/au.v2i1.18

Saputri, R. Y., & Najicha, F. U. (2023). PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENANAMAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA GENERASI MUDA. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, Vol.9.

Sariputta, A., & Ulfatun Najicha, F. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. In *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* (Vol. 9, Issue 1).

Tarigan, B. P., & Najicha, F. U. (2023). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Milenial Yang Bertanggung Jawab.

WorldBank. (n.d.). Gini Index (World Bank estimate). Retrieved from <https://genderdata.worldbank.org/en/indicator/si-pov-gini>